

**KUALITAS MANAJEMEN PUBLIK IMPLIKASI REORGANISASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAYBRAT**

**(Quality Management Implications Of Public Institutions Government
Reorganization District Maybrat)**

Nama : PETRUS MARSELUS AITREM

Prodi : Administrasi Publik

Abstrak

Implikasi reorganisasi kelembagaan pemerintah daerah merupakan persoalan yang mendasar dalam memberikan pelayanan publik terutama pada daerah otonom baru seperti Kabupaten Maybrat. Analisis kelembagaan serta reorganisasi dilaksanakan secara tepat dalam menata pemerintah daerah sehingga terdapat pembagian tugas serta pekerjaan secara terperinci untuk dapat memperlancar proses pelayanan publik pada masyarakat. Kelembagaan organisasi pemerintah daerah disuatu kabupaten apabila terlalu besar maka birokrasi pemerintahannya akan berbelit-belit serta terjadi pemborosan anggaran negara, dengan demikian maka untuk kelembagaan organisasi pemerintah daerah seperti Dinas, Kantor serta badan harus dapat dianalisis terlebih dahulu sesuai urusan pelayanan publik. Apabila terdapat satu urusan yang sama di dua lembaga atau dinas maka sebaiknya digabung agar tidak terjadi pemborosan anggaran daerah dan anggaran negara, begitu pula sebaliknya apabila terjadi urusan yang besar pada suatu kantor maka sebaiknya dipisah menjadi dua lembaga atau kantor sehingga dapat memperlancar pelayanan publik.

Pada umumnya pelayanan publik diwujudkan oleh karena terciptanya suasana sistem pemerintah daerah yang baik, terutama dikaji dari proses pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing pegawai, yang telah tergambar dalam struktur kelembagaan organisasi pemerintah daerah. Peran kelembagaan didalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dapat memberi pengaruh terutama pedoman dan arah sesuai dengan tujuan organisasi masing-masing. Kelembagaan serta struktur juga memberi petunjuk tentang rincian tugas organisasi pada para pegawai atau karyawan sehingga dapat mengetahui tugas apa yang dikerjakan.

Abstract

implications of the institutional reorganization of local government is a fundamental problem in providing public services, especially in the new autonomous regions such as the District Maybrat . Institutional Analysis and reorganization implemented appropriately in managing the local government so that there is a division of tasks and work in detail to be able to expedite the process of public service to the community. Institutional organization of the local government sector in the district if it is too large then the government bureaucracy would be cumbersome and wasteful state budget, and thus to the institutional organization of local government such as the Department, and the Office of the agency should be analyzed first according affairs of public service . If there is one affair that is the same in the two institutions or agencies should be merged in order to avoid wastage of local budgets and state budgets, and vice versa in case of a big deal in an office then it should be split into two agencies or offices that can facilitate public services.

In general, public service embodied by since the creation of the atmosphere of a good system of local government, mainly assessed from service process in accordance with the basic tasks of each employee, which has been reflected in the institutional structure of local government organizations. Institutional role within an organization both government organizations and private organizations can provide guidance and direction of influence, especially in accordance with the objectives of their respective organizations. Institutions and structures also provide clues about the details of the task organization on the employee or employees in order to know what the task.

1. Pendahuluan

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang diikuti dengan Undang-undang No.34 Tahun 2003 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 kemudian Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah memberi kontribusi besar terhadap aplikasi perkembangan administrasi negara di Daerah. Perubahan yang paling sederhana yang ditemukan dalam perubahan organisasi di daerah nampak pada penempatan pegawai dan perubahan struktur organisasi yang dilakukan untuk penyempurnaan pelayanan publik pada masyarakat. Perubahan struktur organisasi dan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian bukan merupakan hal yang sederhana bagi sebuah organisasi melainkan merupakan sesuatu yang serius untuk memperlancar pelayanan publik.

Perubahan tersebut memberi efek yang besar terhadap berbagai dimensi kelembagaan di daerah terutama pada penempatan pegawai yang sesuai. Reorganisasi terjadi dengan dua bentuk yaitu penggabungan dua atau lebih instansi dan perubahan dalam instansi (Organisasi) dipandang perlu dilakukan untuk dapat menciptakan kualitas manajemen publik yang baik sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Konsep yang terkait dengan reorganisasi adalah meneger, akuisisi, revitalisasi, dan restrukturisasi. Implementasi restrukturisasi organisasi memberi efek pada dimensi-dimensi utama pada dalam organisasi yakni manajemen sumber daya manusia (kepegawaian), perubahan manajemen keuangan, perubahan struktur organisasi, perubahan manajemen (tata laksana), kualitas pelayanan publik. Sumber aparatur pada organisasi pemerintah daerah dihadapkan pada dua persoalan utama yakni kualitas dan distribusi (penempatan). Kualitas sumber daya manusia masih merupakan permasalahan serius jika dikaitkan dengan kinerja pemerintah daerah yang secara umum dipandang masih sangat rendah, Permasalahan lain adalah obyektivitas penempatan pegawai yang sesuai dengan skil, kompetensi dasar serta sesuai dengan bidang masing-masing pegawai. Masih kurang pemerintah daerah yang melakukan tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rangka penempatan ataupun promosi jabatan pegawai. Secara fakta dilapangan, penempatan pegawai ataupun promosi jabatan pegawai dipengaruhi unsur politik, nepotisme serta unsur-unsur lain tanpa memandang profesionalitas dari masing-masing pegawai yang ditempatkan. Permasalahan reorganisasi dan kelembagaan memegang peran penting dalam peningkatan kinerja pegawai. Kelembagaan disuatu daerah atau suatu organisasi akan mempengaruhi manajemen keuangan disuatu daerah. Semakin gemuk atau bayak kelembagaan yang besar (gemuk) maka akan terjadi pemborosan anggaran keuangan daerah serta keuangan negara. Implikasi yang paling mudah diidentifikasi adalah

efek reorganisasi terhadap struktur dan dapat berpengaruh pada struktur yang besar maupun struktur yang semakin rampung (flat). Organisasi pemerintah daerah dibentuk berdasarkan struktur yang besar sehingga dipandang tidak efektif dan tidak ekonomis dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Dimensi lain dari implikasi reorganisasi yang perlu mendapat perhatian serta pencermatan adalah tata laksana (manajemen) organisasi. Organisasi pemerintahan masih memiliki kendala mendasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, apabila dibandingkan dengan organisasi swasta lebih konsisten dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagai petunjuk arah dalam pencapaian tujuan organisasi. Praktek manajemen tangan besi sering nampak pada penyelenggaraan organisasi pemerintahan, oleh karena itu perlu pengkajian terhadap perubahan dan perbaikan manajemen pemerintahan khususnya pemerintah daerah. Seharusnya segala bentuk perubahan organisasi mengarah pada kualitas pelayanan publik pemerintah daerah pada publik (Masyarakat umum, organisasi sosial maupun dunia usaha). Oleh karena itu reorganisasi dilakukan oleh pemerintah daerah bukan sekedar memenuhi ketentuan undang-undang atau peraturan melainkan menuju pada tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kebijakan untuk pelayanan publik namun belum menurut pandangan masyarakat kualitas pelayanan publik yang dituntukan pemerintah secara umum masih rendah. Hal ini terbukti masih banyak kasus di negara kita yang belum menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang memberi mandat kepada pemerintah. Perkembangan dan tuntutan perubahan manajemen pemerintahan adalah manajemen pemerintahan atau yang dikenal dengan prinsip from government to governace. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering dengan restrukturisasi organisasi seharusnya berimplikasi pada peningkatan kualitas

pelayanan publik atau dengan kata lain restruktur organisasi pemerintahan secara ideal harus diarahkan pada perwujudan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan aturan hukum, kesetaraan, partisipasi, responsif, berorientasi kesepakatan, efektif, efisien, dan visi strategis. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengimplementasikan konsep atau tersebut pada seluruh aktifitas pemerintahan. Namun kenyataan yang dihadapi pemerintah daerah belum melakukan perubahan secara signifikan ke arah reformasi manajemen pemerintahan terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Kerangka Konsep dan Teori

Pendapat Stephen P. Robbins mengatakan bahwa *Organisasi merupakan kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan*. Organisasi juga diartikan sebagai suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu sosial, organisasi juga dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut juga sebagai studi organisasi (Organizational studies), perilaku organisasi (organizational behaviour) atau analisis Organisasi (Organizational analysis).

Pemahaman teori tentang organisasi dari para ahli sangat diperlukan untuk sebagai bahan guna pengembangan dan penerapan ilmu pada organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh *Stoner* yang mengatakan bahwa *organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengaruh atasan mengejar tujuan bersama*. Pandangan ini lebih menekankan pada hubungan antara pimpinan atau manajer terhadap bawahan artinya apapun yang dilakukan oleh bawahan merupakan perintah

atau arahan dari atasan. Sementara itu *Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktifitas kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih.*lebih menekankan pada aktifitas didalam organisasi. Sedangkan pendapat Prof.Dr. Sondang P. Siagian, mendefinisikan organisasi sebagai persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Pada pendapat S.P. Siagian lebih menekankan pada kerjasama kelompok baik pimpinan maupun bawahan sebagai suatu kesatuan dalam suatu wadah organisasi.

Pada dasarnya manajemen kualitas (Quality management) atau manajemen kualitas terpadu (total quality management) didefinisikan sebagai suatu cara untuk meningkatkan performansi secara terus menerus (Continuous performance improvement) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Pada organisasi pemerintahan berdasarkan sumber daya manusia dan anggaran yang telah disiapkan untuk memperlancar pelayanan publik. Manajemen kualitas juga diartikan sebagai semua aktifitas dari fungsi-fungsi manajemen secara keseluruhan yang menemukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggungjawab, serta implementasinya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality control), jaminan kualitas (quality ansurance) dan peningkatan kualitas (quality improvement). Tanggungjawab pada kualitas manajemen ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak (top management), dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Pada organisasi pemerintah daerah keputusan organisasi

ada pada Bupati/WaliKota atas pertimbangan DPRD dan masyarakat dan kesemuanya untuk memperlancar pelayanan publik pada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen pada organisasi pemerintahan telah dijalankan secara baik melalui kepala Dinas, kantor, dan Badan untuk dapat menjalankan visi dan misi dari Pemerintah daerah, untuk dapat menjalankan program dalam memberikan pelayanan publik dan secara langsung diawasi oleh Bupati atau Walikota sebagai pemimpin di daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian maka penerapan fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memperlancar proses pelayanan pada masyarakat. Dasar dari reorganisasi kelembagaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 yang mengatur tentang struktur dan kelembagaan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif artinya penulis mengkaji sesuai hasil pengamatan langsung tentang fakta, fenomena, keadaan dan yang sedang terjadi dan data yang dihimpun dan disajikan adalah data yang benar berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini data yang berhubungan dengan "kualitas manajemen publik implikasi reorganisasi kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Maybrat". peneliti menggunakan metode kualitatif karena melakukan pengamatan langsung serta mengalami tentang masalah yang diteliti.

4. Hasil

Kelembagaan dan struktur pada organisasi pemerintah daerah yang diteliti adalah mengenai Kantor, Dinas, Badan serta sistem pemerintahan yang ada di kabupaten Maybrat. Dalam menganalisis kelembagaan pemerintah daerah di Indonesia maka didasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 41 tentang tentang kelembagaan atau

struktur organisasi pemerintah daerah. Struktur pemerintah daerah kabupaten Maybrat meliputi :

Jumlah Dinas pada pemerintah Maybrat dapat dilihat pada tabel berikut ini;

No	Masing – Masing SKPD Pada Pemerintah Kab. Maybrat
1	Dinas perikanan
2	Dinas peternakan
3	Dinas pertanian dan ketahanan pangan
4	Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah
5	Dinas pariwisata dan olahraga
6	Dinas pencatatan sipil
7	Dinas perhubungan
8	Dinas kesehatan
9	Dinas pendidikan
10	Dinas pendapatan
11	Dinas kehutanan dan konservasi
12	Dinas tenaga kerja dan kependudukan
13	Dinas pekerjaan umum (KPU)
14	Dinas perindustrian, perdagangan
15	Dinas pertambangan dan energi

Jumlah Kantor Pada Wilayah Pemerintahan Kabupaten Maybrat

No	Nama - Nama Kantor
1	Satuan pamong praja
2	Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
3	Kantor kearsipan daerah

Jumlah Badan Pada Pemerintahan Maybrat

No	Nama – Nama Badan Pada Pemerintah Kabupaten Maybrat
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
2	Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPEDA)
3	Kesbangpol
4	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan pendidikan dan pelatihan
6	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung
7	Rumah sakit umum daerah

Dari struktur tersebut, nampak terlihat dengan jelas tentang tugas dan fungsi sesuai urusan masing-masing Dinas, Kantor dan Badan dalam mencapai tujuan organisasi yakni pelayanan publik pada masyarakat.

5. Pembahasan

Kabupaten Maybrat merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Sorong. Kabupaten Maybrat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2009 yang secara resmi terbentuk menjadi daerah Otonom baru. Potensi yang dimiliki berupa sumber alam yang memadai, bahan tambang yang belum dikelola dan memiliki wilayah yang cukup luas yakni 5.461,69 Km². Batas- batas wilayah kabupaten Maybrat meliputi sebelah utara ; berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw (distrik feef, Senopi dan Kebar), sebelah selatan ; kabupaten sorong selatan (distrik Kokoda dan Kais), sebelah timur ; Kabupaten Teluk Bintuni (Distrik Moskona Utara dan Moskona Selatan), sebelah barat berbatasan dengan ; kabupaten Sorong Selatan

(Distrik Moswaren dan Distrik Sawiat). Selain potensi wilayah yang cukup luas, kabupaten Maybrat juga mempunyai potensi penduduk yang cukup yakni jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 30.843 Jiwa yang tersebar di 24 Distrik atau kecamatan dan 264 kampung dan 1 kelurahan. Mata pencaharian masyarakat maybrat pada umumnya adalah petani, pekerja, dan ada sebagian yang sebagai PNS. Sebagai daerah otonom baru kabupaten Maybrat dihadapkan pada pembenahan kelembagaan serta struktur organisasi agar dapat memberikan pelayanan publik pada masyarakat.

Pada struktur pemerintah daerah kabupaten maybrat telah terlihat secara jelas tentang struktur dan kelembagaan yang secara terperinci menjelaskan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Pertentangan yang ada di kabupaten maybrat terus berlangsung tentang letak pusat pemerintahan antara Distrik Ayamaru dan Kumorkek Distrik Aifat terus menjadi perdebatan yang mengganggu aktifitas pemerintahan. Namun demikian secara bertahap proses pemerintahan terus berjalan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Dengan reorganisasi kelembagaan pemerintah daerah kabupatem maybrat maka perbaikan pelayanan terus diupayakan untuk diperbaiki sebagai inspirasi pelaksanaan pembangunan dikabupaten Maybrat.

6. Kesimpulan

Kelembagaan reorganisasi merupakan faktor penting dalam pembagian tugas-tugas kepada unit – unit kerja sehingga para pegawai dapat mengetahui tugas-tugas secara jelas. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pemerintah yang diterapkan pemerintah daerah kabupaten Maybrat telah sesuai dengan visi dan misi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dimana terlihat dengan struktur

yang ada, telah mencapai keberhasilan pembangunan diberbagai sektor. Hingga sekarang nampak terlihat kabupaten Maybrat telah mengalami peningkatan. Pembagian tugas dalam memperlancar proses pembangunan pada masyarakat bukan hanya berpedoman pada struktur kelembagaan organisasi melainkan pada kualitas pelayanan publik. Maka kabupaten maybrat walaupun masi merupakan salah satu kabupaten baru tetapi terus dibenahi untuk mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Albertcht Karl, 1983, *Teori Pengembangan Organisasi*, Bandung ; Angkasa

Miftah toha, 1989, *Pembinaan Organisasi* , Jakarta ; cv.Raja wali

Stephen P. Robin, *Teori Organisasi, Sruktur, Desain & Aplikasi*, Jakarta ; Arcan

Sondang P. Siagian, 2012, *Teori pengembangan organisasi* , PT. Bumi Aksara

Peraturan Pemerintah Tahun 2007; *Tentang Reorganisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah*